



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI IX DPR RI  
(DEPARTEMEN KESEHATAN, DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
BADAN POM, BKKBN, ASKES, JAMSOSTEK DAN BNP2TKI)**

---

Tahun Sidang	: 2008-2008
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: --
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Kesehatan RI
Sifat Rapat	: <b>Terbuka</b>
Hari/tanggal	: Senin, 16 Februari 2009
Pukul	: 10.00 WIB – selesai
Acara	: 1. Membicarakan hasil kunker Komisi IX DPR RI pada Reses Masa Sidang II Tahun Sidang 2008-2009; 2. Membicarakan masalah-masalah aktual yang berhubungan dengan bidang tugas Departemen Kesehatan RI; 3. Lain-lain
Ketua Rapat	: Dr. Ribka Tjiptaning/Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1 Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir	: 38 orang Anggota dari 50 Anggota Komisi IX DPR RI, izin 9 orang anggota.

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan RI dibuka pukul 10.10 WIB setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib pasal 99 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan **terbuka** untuk umum.

**II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

**a. Paparan Menteri Kesehatan RI, mengenai :**

1. Perkembangan pelaksanaan program Jamkesmas.
2. Masalah-masalah aktual yang berhubungan dengan bidang kesehatan.
3. Tanggapan atas pertanyaan tertulis Komisi IX DPR RI.
4. Tanggapan terhadap kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Lampung, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

**b. Usul/Masukan Anggota :**

1. Masih banyak terjadi penolakan oleh Rumah Sakit terhadap pasien miskin karena tidak masuk kuota sebagai peserta Jamkesmas, untuk itu Depkes diharapkan dapat meningkatkan jumlah peserta Jamkesmas.

2. Departemen Kesehatan diminta untuk klarifikasi mengenai obat Tamiflu yang sudah kadaluarsa.
3. Mengenai kasus dukun cilik Ponari, hal ini menunjukkan gagalnya Pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam menyikapi masalah ini, Depkes harus melakukan koordinasi dengan seluruh stake holder agar kasus-kasus serupa tidak terulang lagi.
4. Klarifikasi mengenai dasar apa yang dipakai oleh Depkes didalam menentukan kuota peserta Jamkesmas yang jumlahnya cukup banyak.
5. Masih banyak ditemukan proses klaim Jamkesmas harus melalui verivikator akibatnya proses klaim menjadi lama, sehingga banyak RS yang belum menerima pembayaran.
6. Akhir-akhir ini telah terjadi banjir di kota-kota besar maupun didaerah, bagaimana Depkes menangani permasalahan ini terkait dengan ketersediaan obat-obatan.
7. Bagaimana koordinasi Depkes dengan departemen terkait dalam menanggulangi masalah gizi buruk dan HIV/AIDS, karena penanganan masalah ini menyangkut lintas departemen.
8. Adanya ketidaksesuaian mengenai jenis obat yang diberikan oleh Dinas Kesehatan dengan penanganan penyakit yang dilakukan oleh Puskesmas-Puskesmas di daerah.
9. Depkes harus memberikan tunjangan khusus/fungsional kepada dokter spesialis di daerah agar dapat memenuhi kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan baik.
10. Sejauh mana tindakan Depkes mengenai kasus penahanan yang dilakukan oleh rumah sakit terhadap pasien yang tidak mampu membayar.
11. Mohon klarifikasi masalah dugaan korupsi yang terjadi di Depkes.
12. Klarifikasi mengenai kebijakan bahwa berobat di puskesmas gratis, akan tetapi kenyataan dilapangan penduduk masih harus membayar jika berobat di Puskesmas.
13. Walaupun anggaran Departemen Kesehatan telah ditingkatkan sampai mencapai Rp.19 triliun, tetapi tidak sebanding dengan tingkat keberhasilan penanggulangan penyakit yang membutuhkan penanganan lebih baik, seperti TB, DB, HIV/AIDS, Malaria, Flu Burung, dll.
14. Keberadaan fakultas kedokteran jangan sampai mengganggu pelayanan rumah sakit terhadap pasien. Bagaimana koordinasi antara Departemen Kesehatan dengan Departemen Pendidikan Nasional mengenai pendidikan fakultas kedokteran di universitas-universitas.
15. Depkes agar berperan aktif dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam menanggulangi wabah rabies di Bali.
16. Depkes telah menetapkan DAK untuk Puskesmas dalam pelayanan kesehatan, dengan demikian anggarannya sudah ada, akan tetapi mereka tidak dapat atau tidak tahu memanfaatkannya, untuk itu Depkes agar mengupayakan untuk merubah Juknis DAK, sehingga kegiatan program dan non program puskesmas tidak timpang.
17. Masih ditemukannya rumah sakit yang tidak dapat melaksanakan INA DRG pada tahun 2008.
18. Disarankan agar Depkes dapat memberikan data mengenai Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas).
19. Diusulkan agar di Madura dibangun rumah sakit rujukan yang representatif, sehingga masyarakat Madura tidak perlu ke Surabaya untuk berobat.
20. Pada saat penyusunan anggaran Depkes Tahun 2010, diusulkan agar pengalokasian anggaran untuk kesehatan jiwa dan kesehatan mata lebih ditingkatkan.
21. Berapa persen desa yang sudah diisi bidan, berapa persen yang sudah operasional.
22. Anggaran TP Depkes mengalami penurunan yang cukup drastis, apakah kebijakan ini dapat menjamin Rumah Sakit di daerah dapat memberikan pelayanan yang optimal.
23. bagaimana terobosan yang dilakukan oleh Depkes untuk menekan angka kematian ibu dan anak, meskipun telah ada Posyandu dan Desa siaga.

24. Depkes agar melibatkan Komisi IX dalam melakukan pengawasan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia tahun 2009.
25. Depkes harus memperjuangkan dokter-dokter PTT untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
26. Depkes harus merespon adanya Rumah Sakit swasta yang bersedia memberikan pelayanan terhadap peserta Jamkesmas.
27. Diusulkan agar Komisi IX DPR RI membentuk Panitia tentang masalah flu burung.


### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN :

1. Komisi IX DPR RI mendesak Departemen Kesehatan RI untuk lebih meningkatkan sosialisasi, koordinasi serta pengawasan pelayanan Jamkesmas dan pelayanan rakyat miskin lainnya yang tidak mempunyai kartu Jamkesmas agar tidak ada lagi masalah di lapangan terkait dengan pelayanan dan hak-hak pasien.
2. Komisi IX DPR RI mendorong Departemen Kesehatan RI untuk menganalisa efektif biaya (*cost effective*) dari usaha pemberantasan penyakit menular (DBD, TB, HIV/AIDS, Malaria, Flu Burung dll.) yang selama ini dilaksanakan.
3. Komisi IX DPR RI meminta Departemen Kesehatan RI meningkatkan kerja sama dengan Departemen lain yang terkait untuk bersama-sama menanggulangi masalah gizi buruk.
4. Komisi IX DPR RI mengusulkan agar Departemen Kesehatan RI meningkatkan alokasi anggaran dan pelayanan untuk kesehatan jiwa.
5. Komisi IX DPR RI mengusulkan agar diadakan perubahan PP No. 55 Tahun 2006 tentang penggunaan DAK agar ada keseimbangan antara dana untuk kegiatan fisik dan non fisik di Puskesmas dengan perbandingan berkisar 40% : 60%.
6. Komisi IX DPR RI mendesak Departemen Kesehatan RI agar melibatkan Komisi IX DPR RI dalam melakukan pengawasan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia Tahun 2009.
7. Komisi IX DPR RI mendesak Departemen Kesehatan RI untuk meningkatkan peran dan fungsi DJSN.
8. Komisi IX DPR RI mendesak agar Departemen Kesehatan RI berkoordinasi dengan Departemen lain yang terkait untuk menindaklanjuti penanggulangan masalah KLB Rabies terutama di Bali.
9. Komisi IX DPR RI mendesak Departemen Kesehatan RI untuk melakukan koordinasi dengan Departemen terkait menyangkut para tenaga kesehatan yang sudah melaksanakan PTT diusulkan otomatis menjadi PNS tanpa melalui testing.

Rapat ditutup pukul 14.35 WIB.

Jakarta, 16 Februari 2009

Komisi IX DPR RI  
Ketua Rapat,



dr. Ribka Tjiptaning